

**PENGARUH SIKAP KERJA APARATUR TERHADAP
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI ANGGOTA
DEWAN DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

Oleh
MOHAMAD RIVAL KIDAMU .
NIM: S.2120066

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2024**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
PENGARUH SIKAP KERJA APARATUR TERHADAP
PELAKSNAAN FUNGSI LEGISLASI ANGGOTA DEWAN DI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Oleh:

MOHAMAD RIVAL KIDAMU

NIM: S2120066

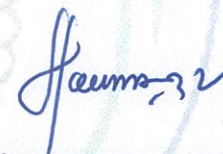
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Menyetujui

Pembimbing I


Dr. Bala Bakri, S.E., S.Psi., MM
NIDN : 0002057501

Pembimbing II


Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si
NIDN: 0930048307

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan


Purwanto, S.IP., M.Si
NIDN : 0926096601

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

PENGARUH SIKAP KERJA APARATUR TERHADAP PELAKSNAAN FUNGSI LEGISLASI ANGGOTA DEWAN DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Oleh:

MOHAMAD RIVAL KIDAMU

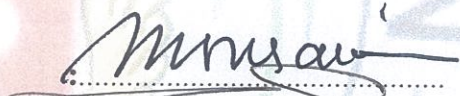
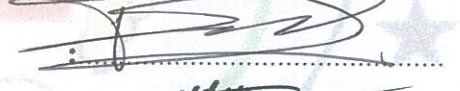


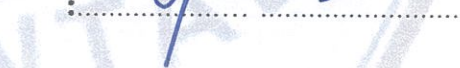
NIM: S2120066

SKRIPSI

Skripsi ini telah memenuhi syarat dan di setujui
Oleh tim penguji Pada Tanggal


Komisi Penguji :

1. Dr. Moch. Sakir, S.Sos.,S.I.Pem.,M.Si
2. Balada Raff, S.Sos.,M.Si
3. Novaliansyah Abdussamad, S.IP.,M.A
4. Dr. Bala Bakri, S.E.,S.Psi.,MM
5. Swastiani Dunggio, S.IP.,M.Si


:.....

:.....

:.....

:.....

:.....

Mengetahui :

Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Moch. Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si
NIDN: 0913078602

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan


Purwanto, S.IP.,M.Si
NIDN: 0926096601

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohamad Rival Kidamu

NIM : S2120066

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Sikap Kerja Aparatur Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi Anggota Dewan Di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone Bolango”** adalah benar benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana, baik di Universitas Icsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan dan saran dari pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan




Mohamad Rival Kidamu

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhahana Wataala yang telah melimpahkan berkah dan ridho-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **Pengaruh Sikap Kerja Aparatur terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi Anggota Dewan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango**, walaupun dalam bentuk dan isi yang sederhana.

Dalam penyusunan Skripsi ini, banyak hambatan dan rintangan yang ditemui, namun atas kerja keras dan masukan dari teman-teman serta bapak dan ibu dosen pembimbing, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga sudilah kiranya berbagai masukan dari teman-teman mahasiswa sangat penulis harapkan demi perbaikan proposal ini.

Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda serta ibunda tercinta yang telah mendidik dan membesarkan penulis.
2. Ibu Dr.Juriko Abdussamad, M.Si selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar Latjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.

4. Bapak Dr. Moch. Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Dr. Bala Bakri, S.IP., SE, MM selaku dosen pembimbing pertama yang banyak memberikan koreksi berupa saran dan perbaikan.
6. Ibu Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si selaku pembimbing II yang juga banyak memberikan koreksi perbaikan dalam penulisan Skripsi ini.
7. Seluruh Dosen, terutama Bapak/Ibu Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Seluruh teman-teman mahasiswa yang telah memberikan motivasi sehingga Skripsi ini dapat selesai.

Akhirnya, penulis berharap agar semua dukungan untuk penyelesaian Skripsi mendapat balasan dari ALLAH SWT, dan semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Gorontalo, Januari 2024

MOHAMAD RIVAL KIDAMU

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
ABSTRAK.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah	1
1.2 Rumusan masalah	6
1.3 Tujuan penelitian	6
1.4 Manfaat penelitian	6

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian manajemen sumber daya manusia	8
2.2 Konsep sikap kerja	11
2.3 Indikator sikap kerja	13
2.4 Tugas dan wewenang anggota DPRD	19
2.5 Hak DPRD.....	20
2.6 Fungsi legislasi.....	22
2.7 Kerangka pemikiran.....	23
2.8 Hipotesis.....	25

BAB OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Obyek penelitian.....	27
3.2 Metode penelitian	27
3.2.1 Desain penelitian	27
3.2.2 Operasionalisasi variabel	27
3.2.3 Populasi dan sampel	29
3.2.4 Teknik pengumpulan data.....	30

3.2.5	Prosedur penelitian.....	30
3.2.6	Teknik analisis data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
4.1.1	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango ...	36
4.1.2	Tugas pokok dan fungsi.....	37
4.2	Hasil Penelitian.....	41
4.3	Deskripsi variabel penelitian	44
4.3.1	Sikap kerja aparatur (vriabel X).....	45
4.3.2	Pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y).....	49
4.4	Uji statistik.....	55
4.5	Pembahasan hasil penelitian.....	58

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.	Kesimpulan	63
5.2.	Saran	..

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Bobot nilai variabel.....	28
Tabel 3.2 Interpretasi koefisien korelasi	32
Tabel 4.1 Uji validitas sikap kerja aparatur (variabel X).....	41
Tabel 4.2 Uji validitas terhadap pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y).....	42
Tabel 4.3 Hasil uji reliabilitas sikap kerja aparatur (variabel X).....	43
Tabel 4.4 Hasil uji reliabilitas pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y).....	44
Tabel 4.5 Tanggapan responden tentang aparatur memiliki moral dan semangat kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas.....	45
Tabel 4.6 Tanggapan responden tentang aparatur memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam melaksanakan tugas.....	46
Tabel 4.7 Tanggapan responden tentang aparatur mengaitkan dirinya dengan pekerjaannya secara aktif untuk berpartisipasi di dalamnya.	46
Tabel 4.8 Tanggapan responden tentang aparatur memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan tugas.....	47
Tabel 4.9 Tanggapan responden tentang aparatur merasa memiliki organisasi yang bersangkutan dan tidak berkeinginan pindah tugas.....	48
Tabel 4.10 Tanggapan responden tentang aparatur bekerja sungguh-sungguh dengan segenap kemampuan kerja yang dimilikinya.....	48
Tabel 4.11 Tanggapan responden tentang keterlibatan anggota dewan dalam berbagai aktivitas untuk menghasilkan produk legislasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat.....	49
Tabel 4.12 Tanggapan responden tentang anggota dewan mengikuti mekanisme penyusunan peraturan daerah (perda).....	50
Tabel 4.13 Tanggapan responden tentang anggota dewan memiliki sikap proaktif untuk mengusulkan rancangan peraturan daerah.....	51

Tabel 4.14 Tanggapan responden tentang anggota dewan mengakomodir aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.....	51
Tabel 4.15 Tanggapan responden tentang anggota dewan melakukan konsultasi publik sebelum rancangan peraturan daerah (ranperda) menjadi peraturan daerah (perda).....	52
Tabel 4.16 Tanggapan responden tentang anggota dewan melakukan peninjauan terhadap peraturan daerah (perda) yang telah dijalankan.....	53
Tabel 4.17 Tanggapan responden tentang anggota dewan melakukan pengawalan terhadap peraturan daerah (perda) yang telah dijalankan.....	53
Tabel 4.18 Tanggapan responden tentang anggota dewan melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan perda.....	54
Tabel 4.19 Model summary sikap kerja aparatur (vriabel X) terhadap pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y).....	55
Tabel 4.20 Koefisien sikap kerja aparatur (vriabel X) terhadap pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y).....	56

ABSTRACT

MOHAMAD RIVAL KIDAMU. S2120066. THE EFFECT OF APPARATUS' WORK ATTITUDES ON THE LEGISLATIVE FUNCTION IMPLEMENTATION OF BOARD MEMBERS AT THE SECRETARIAT OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF BONE BOLANGO REGENCY

This study aims to find the effect of the apparatus' work attitude on the legislative function implementation of board members at the Secretariat of the Regional House of Representatives of Bone Bolango Regency. It employs a quantitative approach with a survey method. The survey research explains the causal relationship and hypothesis testing. The number of samples in this study covers 25 people. The data analysis method uses simple regression analysis. The results of this study show that the apparatus' work attitude (variable X) affects the legislative function implementation of board members (variable Y) at the Secretariat of the Regional House of Representatives of Bone Bolango Regency by 0.758 or 75.8%. It means that the apparatus' work attitude can support the legislative function implementation of the board members.

Keywords: work attitude, legislative function, Secretariat of Regional House of Representatives

ABSTRAK

MOHAMAD RIVAL KIDAMU. NIM. S.2120066. Pengaruh sikap kerja aparatur terhadap pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ichsan Gorontalo, Tahun 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh sikap kerja aparatur terhadap pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey. Penelitian survei yang dimaksud adalah bersifat menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesis. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 25 orang. Adapun metode analisis data menggunakan analisis regresi sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap kerja aparatur (variabel X) berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y) di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango sebesar 0,758 atau sebesar 75,8%. Hal ini berarti bahwa sikap kerja aparatur sudah dapat mendukung pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan.

Kata kunci : sikap kerja, fungsi legislasi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang masalah

Organisasi merupakan tempat orang bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Anggota organisasi atau aparatur merupakan salah satu unsur penting dalam organisasi dan merupakan salah faktor dan pendukung pencapaian tujuan organisasi, serta merupakan faktor penting dalam rangka mencapai suatu mekanisme kerja yang efisien dan efektif. Aparaturlah yang merupakan pelaku penggerak proses mekanisme dalam sistem kerja organisasi, oleh sebab itu agar mekanisme kerja tersebut berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka aparatur harus memiliki sikap kerja yang baik pula.

Bagi setiap organisasi, baik negeri maupun swasta, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, harus terdapat sumber daya berupa organisasi yang dipimpin oleh sekelompok orang yang bertindak sebagai pelaku aktif dalam mengejar tujuan organisasi tersebut. Demikian halnya dengan organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan daerah sebagai mitra kerja yang sejajar dengan pemerintah daerah, yang berarti bahwa kedua lembaga tersebut memiliki kedudukan yang sama dan sejajar serta tidak saling membawahi. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota bahwa

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang berarti lembaga ini juga melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah sebagai mitra sejajar pemerintah daerah. Dengan demikian, undang-undang tersebut telah memberikan peluang yang besar kepada DPRD dalam melaksanakan tugasnya yaitu fungsi legislasi, penganggaran (budgeting) dan pengawasan (control). Tuntutan untuk menjalankan ketiga fungsi DPRD tersebut menjadi keharusan saat ini karena memberikan gambaran umum tentang aktivitas anggota DPRD sebagai wakil masyarakat yang terpilih menjadi anggota DPRD. Oleh karena itu, anggota DPRD Provinsi harus mampu meningkatkan kinerjanya dalam mengesahkan Perda yang sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat dan kebutuhan serta tuntutan masyarakat setempat.

Dari ketiga fungsi tersebut, tugas utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah fungsi legislasi yaitu membentuk peraturan-peraturan daerah yang dibahas terlebih dahulu dengan pimpinan daerah setempat. Dalam rangka memenuhi tugas legislasinya, DPRD mendapat berbagai hak, antara lain hak untuk mempresentasikan rancangan peraturan daerah dan hak untuk melakukan perubahan rancangan peraturan daerah atau pelaksanaan tugas legislasi harus diikuti dengan peraturan daerah.

Pelaksanaan fungsi legislasi tersebut tentulah tidaklah mudah dalam organisasi besar seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, karena merupakan hal yang mustahil jika anggota dewan bekerja sendirian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Olehnya itu, keberadaan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mutlak

diperlukan dan telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang menegaskan bahwa sekretariat dewan (sekwan) merupakan perangkat daerah yang merupakan bagian dari pelayanan administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang melaksanakan kegiatan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas anggota dewan, serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang dibutuhkan oleh anggota dewan. Peraturan Pemerintah tentang sekretariat dewan tersebut juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan demikian, sekretariat dewan memegang peranan penting dalam menyukseskan fungsi legislasi anggota dewan dengan cara memfasilitasi berbagai aktivitas kegiatan anggota dewan, seperti, mulai dari proses kegiatan administrasi, kegiatan perencanaan, pengaturan persiapan dan pelaksanaan semua agenda kegiatan anggota dewan. Contohnya, dalam penyusunan Raperda dalam kegiatan ini Sekretariat DPRD memfasilitasi proses penyusunan Raperda dengan penganggaran dan penyusunan Naskah Akademik (NA). Menurut Pasal 206 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Sekretariat dewan mengangkat dan memberhentikan anggota kelompok ahli dan anggota kelompok ahli sesuai usulan daerah. Fungsi perumusan daerah yang dimiliki dan dikelola DPRD membuahkan hasil berupa peraturan daerah yang dibahas bersama dengan Kepala Daerah. Oleh karena itu, kedudukan DPRD dalam menjalankan fungsi pembentuk peraturan daerah bergantung pada kemampuan anggota DPRD dalam mempresentasikan usulan

RaPerda, sehingga usulan RaPerda menjadi inisiatif dewan daerah secara kelembagaan (Suwanda, 2016:17). Untuk itu, dengan adanya sekretariat dewan diharapkan dapat membantu kinerja anggota dewan dalam melaksanakan fungsi legislasinya.

Demikian halnya dengan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango diadakan untuk membantu anggota dewan dalam melaksanakan fungsinya. Aparatur (staf) dewan harus aktif mempersiapkan kebutuhan dan keperluan rapat anggota dewan tentang peraturan perundang-undangan sebagai bahan dalam rencana pembentukan produk legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, peran aparatur (staf) dewan belum mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam menunjang fungsi anggota dewan. Hasil wawancara penulis dengan salah seorang anggota dewan, yakni bapak Zainudin Bau (12 Agustus 2023) mengatakan bahwa permasalahan yang terkait dengan staf dewan, menyangkut sikap kerja staf dewan dalam membantu anggota dewan seperti dalam mentaati peraturan kerja masih ada staf yang datang terlambat masuk kantor, kurangnya kerjasama antara staf sehingga terkesan kurang mendukung pekerjaan sesama staf, dan masih ada sebagian staf yang berpendapat bahwa mereka adalah perangkat daerah sehingga dalam menjalankan tugasnya mereka bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah dan bukan kepada anggota dewan, sehingga mereka bekerja seadanya saja, padahal setiap staf yang bekerja pada organisasi dewan harus

bekerja secara optimal dalam melaksanakan tugasnya agar dapat mencapai hasil yang maksimal pula. Kondisi tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap anggota dewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis berkesimpulan bahwa semua permasalahan yang muncul di sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango sangat berkaitan dengan sikap kerja aparatur (staf). Antara staf yang satu dengan lainnya tentunya berbeda dalam mengapresiasi sikap kerja mereka. Kebiasaan kerja selama ini yang dibawa oleh setiap staf dewan, sedikit banyak mempengaruhi staf tersebut dalam bersikap. Setiap staf tersebut menghadapi masalah di dalam lingkungan kerjanya, baik dengan rekan kerjanya, atasan atau mungkin dengan pekerjaannya itu sendiri. Kondisi kerja seperti ini dapat disikapi positif atau negatif oleh setiap staf dan akan berdampak pada kualitas kerjanya. Setiap staf tentunya memiliki cara sendiri dalam menghadapi masalah tersebut tergantung pada pengalaman kerja yang mereka miliki, namun pimpinan sekretariat dewan harus ikut andil dalam mencari solusi tersebut agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka perlu diadakan sebuah penelitian dengan mengambil judul: Pengaruh Sikap Kerja Aparatur Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi Anggota Dewan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka masalah pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini ialah:

Seberapa besar pengaruh sikap kerja aparatur terhadap pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango?

1.3. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sikap kerja aparatur terhadap pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango.

1.4. Manfaat penelitian

Ada beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk praktisi

Sebagai bahan masukan bagi pihak pimpinan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk menumbuhkan sikap kerja aparatur dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan.

2. Untuk akademisi

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan disiplin ilmu pemerintahan khususnya pengembangan konsep sikap kerja aparatur dan pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan.

3. Untuk peneliti

Untuk bahan perbandingan antara konsep dan teori yang diterima di bangku kuliah dengan fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian juga sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti lebih lanjut mengenai konsep sikap kerja aparatur dan pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian manajemen sumber daya manusia

Setiap organisasi menginginkan agar pelaksanaan kerja dan penggunaan sumber daya dalam organisasi benar-benar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Untuk itu, perlu adanya pengaturan, pengarahan, dan pendayagunaan. Usaha mengatur dan mengarahkan sumber daya ini, baik manusia maupun peralatannya yang kita kenal dengan istilah manajemen. Manajemen atau tata kelola dalam sebuah organisasi dijalankan oleh seorang pemimpin. Suatu organisasi di nilai mencapai efektivitas tinggi, bila bebas dari berbagai karakteristik ketidakefektivan. Keuntungan dasar model ini memberikan kepada para pemimpin pedoman-pedoman praktis bagi kegiatan diagnosis dan pengembangan. Terry dalam Bangun (2008:2) berpendapat bahwa manajemen adalah ilmu dan seni. Manajemen adalah subjek ilmu pengetahuan dan karenanya secara umum dapat dibuktikan kebenarannya. Pemimpin yang menjalankan tugasnya harus memiliki pengetahuan untuk memimpin organisasi dengan baik. Demikian juga, seni adalah pengetahuan untuk mencapai tujuan. Melalui akuisisi pengetahuan, pengamatan dan penerapan pengetahuan manajemen, kompetensi untuk pekerjaan itu dibuat. Koontz, dkk dalam Bangun (2018:3) mengemukakan bahwa seni yang paling produktif selalu didasarkan pada pemahaman akan ilmu yang mendasarinya. Oleh karena itu, seni dan ilmu bukannya saling bertentangan, melainkan saling melengkapi.

Kesalahan umum dalam menggunakan informasi dalam manajemen adalah bahwa organisasi tidak memperhitungkan pertukaran antara individu dan kelompok. Organisasi harus memperhatikan kerjasama antara individu dan kelompok untuk meraih hasil yang efektif dan efisien. Pimpinan dalam mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan orang lain, dapat memimpin, mempengaruhi dan mengawasi kumpulan orang tersebut dalam mencapai tujuan-tujuannya. Pimpinan bertanggung jawab atas tugas-tugasnya dalam organisasi atau bagian-bagian yang ada dalam organisasi tersebut. Pimpinan adalah orang yang melaksanakan aktivitas-aktivitas manajemen untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Koontz, dkk dalam Bangun (2018:3) mengatakan bahwa sebagai pimpinan adalah orang yang mencapai hasil dengan menciptakan suasana tertentu guna menunjang keefektifan usaha kelompok pasti menjalankan fungsi-fungsi yang sama.

Selain itu, Fahmi (2012:2) menyatakan bahwa manajemen ialah ilmu yang mempelajari secara komprehensif bagaimana mengarahkan dan membimbing orang dari berbagai latar belakang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ini disebut manajemen sumber daya manusia.

Agar suatu organisasi dapat terus bertahan dan tetap kompetitif, penguasaan teknologi saja tidak cukup kecuali didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Investasi pada sumber daya keuangan yang paling berharga, yaitu sumber daya manusia, karenanya tidak dapat ditunda lagi dan karenanya harus dikelola dengan baik dalam pengelolaan sumber daya manusia. Simamora dalam Sutrisno (2016:5)

menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia ialah pemanfaatan, pengembangan, evaluasi, penghargaan dan kepemimpinan individu anggota organisasi atau kelompok pegawai. Kemudian Dessler dalam Sutrisno (2016:5) menyatakan manajemen orang sebagai kebijakan dan praktik yang diperlukan dari seorang individu yang melakukan aspek "orang" dari peran kepemimpinan, termasuk rekrutmen, seleksi, pelatihan, kompensasi, dan evaluasi. Fokus manajemen sumber daya manusia terletak pada upaya mengelola sumber daya manusia di dalam dinamika interaksi antara organisasi pekerja yang seringkali memiliki kepentingan berbeda. Menurut Stoner dalam Sutrisno (2016:6) manajemen sumber daya manusia melibatkan penggunaan sumber daya manusia secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi dan memenuhi kebutuhan individu pegawai.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, dan pemeliharaan, dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi secara terpadu yang telah ditetapkan bersama-sama.

2.2. Konsep sikap kerja

Layanan yang diberikan oleh perangkat aparatur tergantung pada sikapnya untuk memberikan layanan kepada siapa saja yang membutuhkan layanan tersebut. Sikap kerja yang terlihat dalam organisasi menunjukkan bahwa seorang pegawai membutuhkan bantuan untuk membuat keputusan yang baik. Keberhasilan

peningkatan efisiensi pelayanan ditentukan oleh sikap aparatur pemerintah dan faktor kemampuan kerja dalam meningkatkan pelayanan yang baik.

Notoatmodjo (2007) mengartikan sikap sebagai reaksi atau reaksi seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau suatu objek. Perwujudan dari sikap ini tidak serta merta tampak, tetapi hanya dapat diartikan dari perilaku tertutup sebelumnya. Sikap ini merupakan kesiapan atau kerelaan untuk bertindak dan bukan pelaksanaan motif tertentu.

Evaluasi sikap aparatur diperiksa dengan menggunakan pendekatan umum dan khusus. Riset secara khusus karena bisa lebih detail dan memiliki nilai liabilitas yang jauh lebih akurat. Karena apa yang kita harapkan dapat tercapai melalui kerjasama setiap individu dengan perilaku yang berbeda-beda. Selain itu, perilaku dalam organisasi memiliki pengaruh yang besar terhadap berfungsinya organisasi. Kami dapat merasakan sikap karyawan ini melalui layanan yang kami terima. Sikap tidak dapat dipisahkan dari kegiatan sehari-hari seseorang, namun sikap dapat mencerminkan sikap orang tersebut. Sikap adalah persepsi seseorang tentang dimana mereka berada, terutama di tempat kerja

Menurut Robbins dan Judge (2008:92), sikap ialah ungkapan penilaian yang positif yang memberi kebahagiaan atau tidak bahagia kepada suatu keadaan, person, atau kejadian dan sikap dapat berwujud tanggungjawab pada aktivitas serta komitmen anggotanya dalam suatu institusi.

Terdapat beberapa definisi sikap, antara lain (Rahayuningsih, 2016:82):

1. Berorientasi kepada respon (Orientasi pegawai dalam memberikan pelayanan public). Sikap adalah suatu bentuk dari perasaan, yaitu perasaan mendukung atau memihak (*favourable*) maupun perasaan tidak mendukung (*unfavourable*) pada suatu objek.
2. Responsif (disiplin, sopan dan ramah). Sikap adalah kesediaan untuk menanggapi suatu objek dengan cara tertentu ketika mereka menghadapi stimulus yang membutuhkan tanggapan, dan pola perilaku, kecenderungan atau kesiapan antisipatif untuk menyesuaikan diri dengan situasi sosial yang terkondisi.
3. Berorientasi kepada skema triadic (Respon dan tanggap terhadap permintaan dan keluhan pelayanan). Sikap merupakan konstelasi komponen-komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek di lingkungan sekitarnya

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, Ivancevich (2009:88) merumuskan sikap kerja sebagai keadaan mental yang dipelajari dan diorganisasikan melalui pengalaman, menghasilkan pengaruh spesifik pada respon terhadap orang lain, obyek dan situasi yang berhubungan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, sikap kerja memegang peranan penting dalam kehidupan organisasi. Padahal, sikap seringkali memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja rutinitas kerja mereka. Sikap kerja adalah kecenderungan untuk

menilai pendapat, pendapat atau sikap seseorang tentang suatu objek atau masalah dan bertindak menurut penilaiannya, menyadari perasaan positif dan negatif dalam menghadapi objek tersebut.

2.3. Indikator sikap kerja

Sikap kerja yang terlihat dalam organisasi menunjukkan bahwa seseorang membutuhkan bantuan untuk membuat keputusan yang baik. Keberhasilan peningkatan efisiensi pelayanan publik ditentukan oleh sikap pemerintah dalam meningkatkan pelayanan yang baik. Pegawai yang menjalankan tugasnya dalam suatu organisasi memiliki sikap kerja dan perilaku kerja yang berbeda di tempat mereka bekerja. Saat mengevaluasi sikap kerja mereka, tidak ada nilai yang sama antara perangkat yang berbeda. Budaya yang dibawa oleh masing-masing perangkat mempengaruhi perilaku perangkat tersebut. Sikap kerja meliputi evaluasi positif atau negatif seseorang terhadap lingkungan kerjanya. Dalam ilmu manajemen sumber daya manusia, sebagian besar penelitian tentang sikap kerja berfokus pada tiga sikap: kepuasan kerja, keterlibatan kerja dan komitmen organisasi (Robbins dan Judge, 2016).

a) Kepuasan kerja

Ketika kepuasan kerja terjadi, biasanya tercermin dalam perasaan aparatur tentang pekerjaannya, yang sering diwujudkan dalam sikap positif aparatur terhadap pekerjaan mereka dan segala sesuatu yang mereka temui atau ditugaskan di lingkungan kerja. Pemantauan yang cermat dan terus menerus terhadap kepuasan

kerja karyawan sangat penting untuk menarik perhatian pejabat manajemen, khususnya SDM.

Pada umumnya para aparaturi terdiri dari mereka yang ingin menunjukkan hasil karya yang melebihi sekedar persyaratan minimal. Karena itu, pekerjaan yang mengandung tantangan yang apabila terselesaikan kewenangan baik merupakan salah satu sumber kepuasan kerja. Sutrisno (2016:75) mengatakan pada hakikatnya, kepuasan kerja merupakan perasaan senang atau senang bekerja dalam memandang dan menjalankan pekerjaannya. Apabila seseorang senang terhadap pekerjaannya, maka orang tersebut puas terhadap pekerjaannya

Setiap orang dipuaskan berbeda-beda tergantung nilai kerjanya (wirausaha, peduli dan teliti). Karena terdapat perbedaan mendasar antara setiap individu, maka kecenderungan untuk mencapai tingkat kepuasan tertentu juga berbeda-beda. Namun pada dasarnya, semakin banyak orang setuju dengan nilai-nilai di tempat kerja, semakin tinggi kepuasan yang mereka rasakan. Sebaliknya, aspek-aspek pekerjaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya menimbulkan ketidakpuasan kerja.

Oleh karena itu, kepuasan kerja perangkat harus diciptakan sebaik mungkin untuk meningkatkan semangat perangkat, dedikasi, kecintaan dan kedisiplinan. Menurut Fathon (2018:174) Kepuasan kerja adalah sikap emosional menikmati dan mencintai pekerjaan. Sikap ini teraplikasi dalam moral kerja, kedisiplinan dan

prestasi kerja. Kepuasan ini dinikmati di tempat kerja, di luar pekerjaan, dan dalam kombinasi apa pun antara bekerja dan bermain

b) Keterlibatan Kerja.

Dalam dunia kerja, ada alasan mendasar mengapa perangkat keras harus mengikuti perkembangan yang pesat. Organisasi pasti ingin memajukan organisasinya dengan menyeimbangkan kegiatan organisasi lain. Oleh karena itu, organisasi memerlukan keterlibatan seluruh anggotanya yang ikut serta dalam kegiatan organisasi. Robbins dan Judge (2016) mengatakan bahwa work engagement adalah tingkat di mana seseorang terhubung dengan pekerjaannya, terlibat secara aktif di dalamnya, dan menganggap kinerjanya penting untuk harga dirinya.

Berbagi pekerjaan adalah situasi di mana manajer menegosiasikan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dengan bawahan sehingga mereka bekerja sama sebagai satu tim (Davis dan Newstrom, 2000). Pada dasarnya partisipasi dalam pekerjaan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu.

- a. Keterlibatan mental dan emosional. Partisipasi bukan hanya aktivitas fisik, tetapi juga aktivitas mental dan emosional. Bukan hanya kemampuan mereka, tetapi diri mereka sendiri Partisipasi itu lebih bersifat psikologis daripada fisik. Partisipasi dipahami tidak hanya berpartisipasi dalam pekerjaan, tetapi juga dalam pertemuan, meminta pendapat dan lainnya (Dewi, 2008).

- b. Motivasi Kontribusi. Keterlibatan adalah situasi di mana seorang pemimpin mendorong orang untuk berbagi minat. Mereka diberi kesempatan untuk menyalurkan inisiatif dan kreativitasnya untuk mencapai tujuan organisasi.
- c. Tanggung jawab. Partisipasi mendorong orang untuk mengambil tanggung jawab atas kegiatan kelompok. Ini juga merupakan proses sosial yang mengarah pada orang yang berpartisipasi dalam organisasi dan ingin membuat mereka sukses
- c) Komitmen organisasional

Sebuah organisasi akan dapat dengan mudah mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama, kalau organisasi yang bersangkutan memiliki komitmen yang tinggi kepada anggotanya dalam bekerja. Organisasi akan mendapat kepercayaan penuh dari para anggotanya, jika anggota yang bersangkutan memiliki komitmen organisasi, karena hanya dengan komitmen yang tinggi kepada anggotanya, maka mereka akan merasa memiliki organisasi yang bersangkutan dan akan bekerja sungguh-sungguh dengan segenap kemampuan kerja yang dimilikinya.

Ridwan (2009:200) mengatakan bahwa komitmen pada organisasi merupakan salah satu aspek perilaku penting yang dapat dipakai untuk mengevaluasi kekuatan ikatan (*attachment*) para pegawai terhadap organisasi tempat ia bekerja. berbagai lingkungan pekerjaan yang memiliki hubungan dengan komitmen organisasional, antara lain keterandalan organisasi yaitu sejauhmana individu merasa bahwa organisasi dapat diandalkan.

Kemudian Meyer dan Allen dalam Umam (2010:258) mengatakan komitmen organisasi sebagai konstruk psikologis yang mencirikan hubungan antara anggota organisasi dengan organisasinya dan berimplikasi pada keputusan individu untuk melanjutkan keanggotaan dalam organisasi. Berdasarkan definisi ini, anggota yang berkomitmen pada organisasinya bertahan lebih baik sebagai bagian dari organisasi daripada anggota yang tidak berkomitmen pada organisasi.

Mayer dan Allen dalam Kaswani (2012:293) menyatakan bahwa komitmen organisasi terdiri dari tiga dimensi

1. Komitmen afektif

Menunjukkan keinginan emosional yang kuat dari aparatur untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang ada guna mencapai tujuannya dan keinginan untuk tetap berada dalam organisasi. Keterikatan afektif dapat muncul pada seorang aparatur karena alasan berikut: karakteristik individu, karakteristik struktur organisasi, pentingnya tugas, keahlian yang berbeda, umpan balik dari eksekutif dan keterlibatan dalam manajemen. Usia dan masa kerja dalam organisasi sangat berhubungan positif dengan komitmen afektif. Karyawan yang terlibat secara afektif cenderung bertahan dengan perusahaan karena mereka memiliki kepercayaan penuh pada tugas yang dilakukan institusi.

2. Komitmen kelanjutan

Merupakan komitmen yang didasarkan pada kekhawatiran seseorang akan kehilangan sesuatu yang telah dicapainya dalam organisasi, seperti: gaji, peralatan dan

lain-lain. Faktor yang menyebabkan komitmen berkelanjutan antara lain umur, status dan berbagai fasilitas dan tunjangan yang diterima. Komitmen ini berkurang ketika keragaman fasilitas dan tunjangan yang diterima aparatur berkurang.

3. Komitmen normatif

Menunjukkan tanggung jawab moral aparatur untuk bertahan dalam organisasi. Alasan dari komitmen ini adalah tuntutan sosial yang timbul dari pengalaman seseorang dalam berhubungan dengan orang lain atau kepatuhan terus-menerus kepada panutan atau pemilik organisasi berdasarkan gaji, penghargaan sosial, budaya atau agama.

Jika aparatur tersebut sudah memiliki komitmen organisasi, maka anggota yang bersangkutan harus mengutamakan untuk sekedar mengejar kepentingan organisasi yang dijanjikan. Di sisi lain, komitmen berarti mematuhi aturan dan bertindak berdasarkan janjinya. Semakin banyak komitmen yang digunakan, semakin tinggi kinerja yang dicapai. Namun, dalam praktiknya, tidak semua anggota sepenuhnya mematuhi komitmen tersebut. Keterlibatan sangat tinggi dan sangat rendah. Faktor yang sangat mempengaruhi tingkat komitmen adalah faktor internal dan eksternal anggota.

2.4. Tugas dan wewenang anggota DPRD

DPRD telah diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sedemikian rupa sehingga berjalan dengan baik. Pasal 154 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) Membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama gubernur/walikota;
- b) Pembahasan dan pengesahan rancangan perda Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Kepala Negara/Walikota;
- c) mengendalikan pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran daerah kabupaten;
- d) memilih walikota/bupati;
- e) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota/bupati kepada Menteri, melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, untuk disetujui pengangkatan dan pemberhentiannya;
- f) menyampaikan pendapat dan refleksi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota tentang rencana pembuatan perjanjian internasional di daerah;
- g) menyetujui rencana kerjasama internasional pemerintah daerah kabupaten/kota;
- h) meminta penjelasan tentang tanggung jawab walikota/bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kota/kabupaten;
- i) menerima rencana kerja sama dengan daerah lain atau pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j) melakukan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5. Hak DPRD

Selain itu, telah diberikan hak kepada DPRD berdasarkan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah agar DPRD dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kehendak rakyat yang diwakilinya. DPRD berhak :

- a) Hak interpelasi yakni. hak DPRD untuk meminta informasi kepada pimpinan daerah tentang kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berimplikasi luas bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara
- b) Hak angket yakni hak DPRD untuk melakukan pemeriksaan terhadap tindakan penting dan strategis pemerintah daerah yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, daerah, dan negara serta diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Hak menyatakan pendapat, yakni hak DPRD untuk mengeluarkan pendapat atas kebijakan pimpinan daerah atau kejadian luar biasa di daerah disertai usulan penyelesaian atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak angket dan penyidikan.

Selain itu menurut Asmawi (2014:9) Sehubungan dengan pelaksanaan tugas legislasi DPRD, yaitu. H. pembentukan peraturan daerah, hak yang digunakan untuk mendukung tugas legislasi adalah:

- a) Hak Penyelidikan

Hak investigasi dapat digunakan untuk evaluasi, brainstorming untuk pembuatan atau modifikasi peraturan yang ada. Hak angket tidak hanya untuk mengetahui

kebijakan pemerintahan daerah yang sedang berjalan, tetapi juga untuk berbagai kepentingan legislasi

b) Hak Inisiatif (hak mengajukan ranperda)

DPRD dapat menyusun dan mengusulkan Raperda atas prakarsa sendiri. Dalam praktiknya, hak inisiatif DPRD kurang produktif. Biasanya inisiatif datang dari pemerintah kota/kabupaten.

c) Hak Amandemen (mengadakan perubahan atas ranperda)

Hak untuk mengubah ini pada prinsipnya berlaku bagi peraturan daerah yang diprakarsai oleh pemerintah kota/kabupaten, tetapi tidak menutup kemungkinan perubahan Ranperda karena inisiatif DPRD sendiri. Secara teknis, hak amandemen tidak pernah dilaksanakan. Hal ini terjadi karena Ranperda yang sedang dibahas DPRD selalu dilakukan bersama pemerintah daerah.

2.6. Fungsi legislasi

Fungsi lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat yang paling penting ialah menentukan kebijakan dan membuat peraturan. Olehnya itu, anggota dewan sebagai wakil rakyat yang diberikan kepercayaan untuk duduk di lembaga legislatif, harus betul-betul mewakili suara rakyat dengan melihat kepentingan dan mendengar aspirasi yang berkembang dimasyarakat dalam menyusun peraturan perundang-undangan agar produk regulasi yang dihasilkan nanti, betul-betul berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kualitas undang-undang atau perda yang dibuat oleh

anggota dewan, akan menunjukkan warna serta kualitas anggota dewan yang bersangkutan, baik secara material maupun secara fungsional.

Menurut Lili Romli dan Suryarama (2016:617) ada dua mekanisme dalam penetapan rancangan Peraturan Daerah (raperda). Pertama, usulan raperda berasal dari eksekutif. Kedua, usulan raperda dari legislatif (DPRD). Apabila mekanisme raperda usulan dari eksekutif, maka kepala daerah mengusulkan raperda kepada pimpinan DPRD melalui surat kepada kepala daerah. Pimpinan DPRD menyampaikan raperda tersebut kepada seluruh anggota DPRD. Sementara itu, mekanisme raperda usulan dari DPRD dilakukan dengan cara raperda usul inisiatif DPRD beserta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada kepala daerah. Pimpinan DPRD menyampaikan raperda tersebut kepada seluruh anggota DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjalankan fungsi legislasi khususnya dalam melahirkan produk rancangan peraturan daerah (Ranperda) sebelum menjadi peraturan daerah (perda), baik inisiatif legislatif itu sendiri maupun inisiatif eksekutif ditinjau dari: mekanisme penyusunan peraturan daerah (Perda), sikap proaktif anggota legislatif, mengakomodir aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, konsultasi publik sebelum rancangan peraturan daerah (Ranperda) menjadi peraturan daerah (Perda), dan melakukan peninjauan atau pengawasan terhadap peraturan daerah (Perda) yang telah dijalankan.

Fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Pasal 149 ayat (1) huruf a dilaksanakan

dengan cara: a. membicarakan walikota/bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Peraturan daerah kota/kabupaten; b. memberikan usul rancangan Peraturan daerahkota/kabupaten; dan c. membuat program pembentukan peraturan daerah kota/kabupaten dengan walikota/bupati.

2.7. Kerangka pemikiran

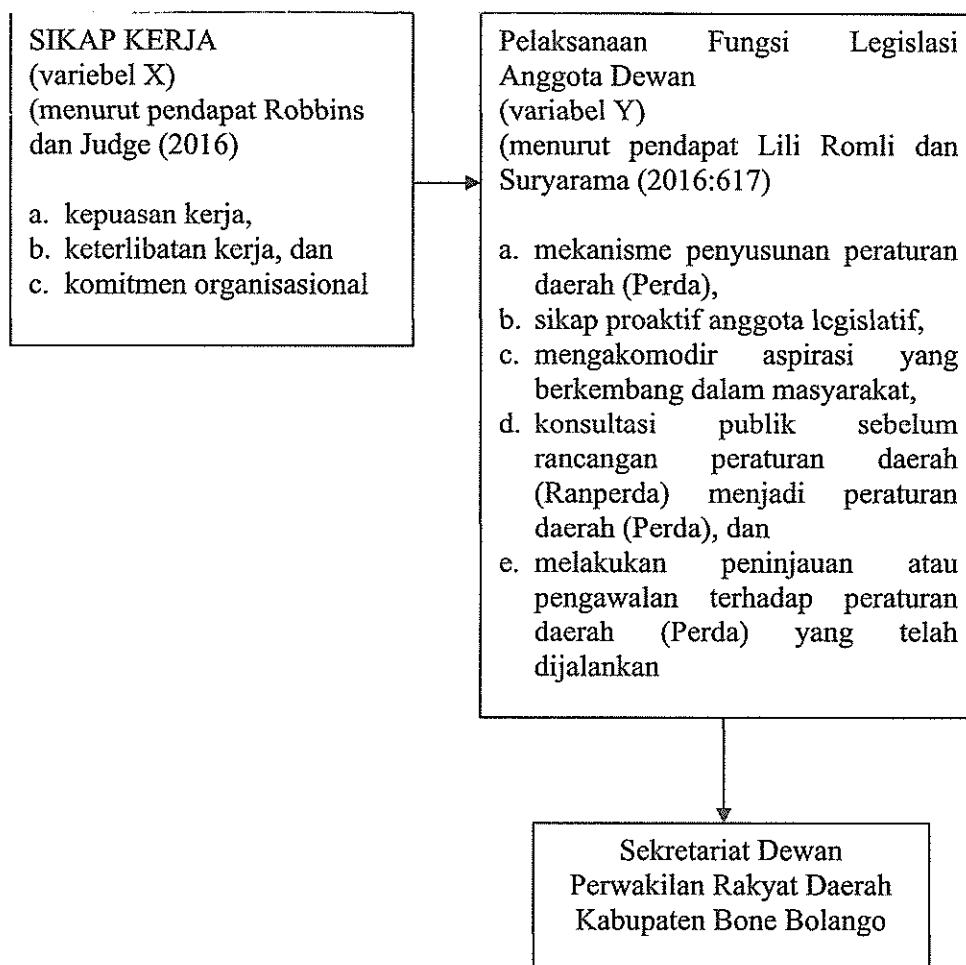
Sikap kerja aparatur dalam organisasi sekretariat DPRD merupakan faktor utama, sebab manusia merupakan dimensi pokok dalam organisasi atau lembaga yang amat penting dalam mencapai tujuan, baik tujuan individu maupun tujuan dari organisasi. Masalah dalam sikap kerja adalah suatu masalah yang perlu dipahami oleh para aparatur, khususnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan. Sebagai suatu usaha kerja sama aparatur dalam organisasi, individu membawa ke dalam tatanan organisasi kemampuan, kepercayaan pribadi, penghargaan, keutuhan dan pengalamannya. Oleh individu dan karakteristik akan dibawa ketika memasuki lingkungan baru yaitu organisasi.

Dalam penelitian ini, untuk mengukur variabel sikap kerja digunakan pendapat Robbins dan Judge (2016), yang mengatakan bahwa sikap kerja difokuskan pada tiga sikap yaitu kepuasan kerja, keterlibatan kerja dan komitmen organisasional. Kemudian untuk mengukur variabel pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan, digunakan pendapat Lili Romli dan Suryarama (2016:617) yang mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjalankan fungsi legislasi khususnya dalam melahirkan produk rancangan peraturan daerah (Ranperda) sebelum menjadi

peraturan daerah (perda), ditinjau dari: mekanisme penyusunan peraturan daerah (Perda), sikap proaktif anggota legislatif, mengakomodir aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, konsultasi publik sebelum rancangan peraturan daerah (Ranperda) menjadi peraturan daerah (Perda), dan melakukan peninjauan atau pengawalan terhadap peraturan daerah (Perda) yang telah dijalankan.

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1 Bagan kerangka pemikiran



2.8. Hipotesis

Riduwan (2018:35) mengatakan bahwa hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji lagi kebenarannya melalui penelitian ilmiah. Hipotesis dalam penelitian ini ialah:

Ho: Sikap kerja aparatur (variabel X) tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y) di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ha: Sikap kerja aparatur (variabel X) berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y) di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah mengenai pengaruh sikap kerja aparatur (variabel X) terhadap pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y) di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango. Penelitian direncanakan dilaksanakan kurang lebih tiga bulan.

3.2. Metode penelitian

3.2.1. Desain penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey. Penelitian survei yang dimaksud adalah bersifat menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesis. Lalu, Sugiyonon (2016:8) mengatakan metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian berdasarkan filosofi positivisme, yang digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu. Alat penelitian digunakan dalam pengumpulan data. Analisis data bersifat kuantitatif/statistik dan bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2.2. Operasionalisasi variabel

Berdasarkan kerangka pemikiran maka operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Sikap kerja merupakan pendirian aparatur untuk menilai suatu objek atau pekerjaan untuk bertindak sesuai dengan penilaiannya. Menurut Robbins dan Judge (2016), sikap kerja difokuskan pada tiga sikap yaitu

- a) Kepuasan kerja merupakan perasaan senang bekerja dalam memandang dan menjalankan pekerjaannya yang tercermin oleh moral kerja, kedisiplinan dan prestasi kerja.
- b) Keterlibatan kerja merupakan kecenderungan aparatur mengaitkan dirinya dengan pekerjaannya secara aktif untuk berpartisipasi di dalamnya. Keterlibatan kerja dapat dilihat pada aspek, yakni keterlibatan mental dan emosional, motivasi kontribusi dan tanggung jawab.
- c) Komitmen organisasional merupakan ketaatan aparatur dalam bertindak sejalan dengan janji-janjinya, yang dapat dilihat dari dimensi, yaitu komitmen afektif, komitmen kelanjutan, dan komitmen normatif.

Kemudian, pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan dilihat dari keterlibatan anggota dewan dalam berbagai aktivitas untuk menghasilkan produk legislasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat, yang meliputi mekanisme penyusunan peraturan daerah (perda), sikap proaktif anggota legislatif, mengakomodir aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, konsultasi publik sebelum rancangan peraturan daerah (ranperda) menjadi peraturan daerah (perda), dan melakukan peninjauan atau pengawasan terhadap peraturan daerah (perda) yang telah dijalankan.

Dalam pengujian, setiap variabel diukur dengan skala Likert. Kuesioner disusun dengan menyiapkan (lima) pilihan: selalu, sering, jarang/kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Setiap opsi diberi bobot nilai yang berbeda, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

Tabel 3.1
Bobot nilai variabel

Pilihan	Bobot
Sangat setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Ragu-ragu (RR)	3
Kurang setuju (KS)	2
Tidak setuju (TS)	1

3.2.3. Populasi dan sampel

3.2.3.1. Populasi

Sugiyono dalam Riduwan (2017:54) mengatakan bahwa populasi adalah domain generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik berbeda yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan dari situ mereka kemudian menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango yang berjumlah 25 orang.

3.2.3.2. Sampel

Sampel menurut Arikunto dalam Riduwan (2017:56) ialah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Dalam penelitian ini teknik penentuan

sampel menggunakan teknik sensus, yakni anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango yang berjumlah 25 orang.

3.2.4. Teknik pengumpulan data

Adapun dalam pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner, adalah teknik pengambilan data dengan membuat daftar pertanyaan yang diberikan pada anggota sampel yang bersedia memberikan respons (responden) atau jawaban.

3.2.5. Prosedur penelitian

Untuk dapat meyakini bahwa instrumen atau alat ukur yang valid dan andal, maka instrumen tersebut sebelum digunakan harus diuji validitas dan reliabilitasnya, sehingga apabila digunakan akan menghasilkan data yang objektif.

3.2.5.1. Uji validitas

Menurut Arikunto (2006:219) Validitas adalah ukuran yang menunjukkan derajat validitas atau legitimasi instrumen yang bersangkutan, yang mampu mengukur apa yang diukur. Uji validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan setiap pernyataan dengan skor total untuk setiap variabel. Selain itu, ketika menafsirkan koefisien korelasi. Untuk menguji dengan rumus:

$$r_{xy} = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{((n\sum X^2) - (\sum X)^2)((n\sum Y^2) - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan:

X = Variabel bebas

Y = Variabel terikat

r = Koefisien korelasi

n = Banyaknya sampel

Selanjutnya di hitung dengan uji t dengan rumus:

$$t \text{ hitung} = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t = nilai t hitung

n = jumlah responden

r = koefisien korelasi hasil r hitung

Selain itu, angka korelasi yang ditentukan menggunakan hasil perhitungan diubah menjadi nilai t-Student dan dibandingkan dengan t-tabel dengan (n-2) derajat kebebasan pada tingkat signifikansi yang dipilih. Jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, query dianggap valid. Jika t-score kurang dari atau sama dengan nilai t-tabel, maka soal dianggap tidak valid. Sedangkan untuk menentukan validitas effect size atau ukuran korelasi masing-masing variabel menggunakan interpretasi koefisien korelasi seperti pada tabel di bawah ini

Tabel 3.2
Interpretasi koefisien korelasi

Koefisien korelasi/jalur	Kategori
<0,20	Keeratan hubungan sangat rendah, hampir dapat diabaikan
0,20 – 0,40	Keeratan hubungan rendah
0,40 – 0,70	Keeratan hubungan sedang
0,70 – 0,90	Keeratan hubungan tinggi
0,90 – 1,00	Keeratan hubungan sangat tinggi

Sumber : Riduwan (2017:136)

3.2.5.2. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran relatif konsisten bila pengukuran diulang dua kali atau lebih. Dengan kata lain, keandalan adalah indeks seberapa andal atau dapat dipercaya sebuah meteran. Meter digunakan dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan nilai yang diperoleh relatif konsisten. Dan untuk menguji reliabilitas dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach (α) dilakukan untuk rentang data/jenis instrumen sederhana yang telah memiliki tingkat reliabilitas atau reliabilitas yang dapat diterima apabila nilai efisiensi reliabilitas yang diukur adalah variabel $\geq 0,60$ atau 60%. Rumus yang digunakan adalah rumus alfa Cronbach (α), yaitu

$$a = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum a^2}{a1^2} \right)$$

Dimana :

a = Relibilitas intrument

k = Banyaknya pertanyaan

$\sum a^2$ = Jumlah pertanyaan

$a1^2$ = Total varians

3.2.6. Teknik analisis data

3.2.6.1. Rancangan uji hipotesis

Untuk memastikan apakah terdapat pengaruh sikap kerja aparatur (vriabel X) terhadap pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y) di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango, maka pengujian dilakukan dengan menggunakan metode regresi sederhana. Metode regresi sederhana dapat dilihat pada gambar berikut:

Struktur regresi sederhana



Keterangan:

X = sikap kerja aparatur

Y = pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan

3.2.6.2. Pengujian Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian, dalam penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif kuantitatif, dimana data yang dikumpulkan dari responden, khususnya dari kuesioner, dideskripsikan dan dituangkan ke dalam tabel frekuensi dan persentase.

Uji hipotesis terbagi dalam beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

a) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan nilai yang menggambarkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Mengetahui nilai koefisien determinasi dapat menjelaskan kebaikan model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi, semakin baik variabel independen dapat menjelaskan perilaku variabel dependen

b) Uji statistik F

Uji F atau uji koefisien regresi simultan, yaitu. untuk mengetahui secara simultan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, terlepas dari pengaruhnya signifikan atau tidak. Uji F dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada keluaran uji ANOVA. Jika nilai signifikan $F < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

c) Analisis regresi linier sederhana

Selanjutnya untuk menguji pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan uji statistik dengan menggunakan analisis regresi sederhana (Riduwan, 2017:145) dengan formulasi sebagai berikut:

Persamaan regresi :

$$\hat{Y} = a + b X$$

$$a = \frac{\sum Y - b \cdot \sum X}{n}$$

$$b = \frac{n \cdot \sum XY - \sum X \cdot \sum Y}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

Keterangan:

X = sikap kerja aparatur

Y = pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan

a = Nilai Konstanta harga Y jika X = 0

b = Nilai sebagai penentu ramalan (prediksi) yang menunjukkan nilai peningkatan (+) atau nilai penurunan (-) variabel Y.

Korelasi PPM ditunjukkan dengan (r) kecuali nilai r lebih besar dari harga $(-1 \leq r \leq +1)$. Jika $r = -1$ berarti korelasi negatif sempurna; $r = 0$ berarti tidak ada korelasi;

dan $r = 1$ berarti korelasinya sangat kuat. Selain itu, untuk menyatakan besarnya kontribusi variabel X terhadap variabel Y, dapat ditentukan dengan menggunakan rumus koefisien ekspresi sebagai berikut:

$$KP = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KP = Nilai koefisien diterminan

R = Nilai koefisien korelasi

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum lokasi penelitian

4.1.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango (disingkat DPRD Bone Bolango) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten yang ada di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. DPRD Bone Bolango memiliki 25 anggota yang tersebar di 8 partai politik, dengan perolehan kursi terbanyak diraih oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem). Pimpinan DPRD Kabupaten Bone Bolango terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango dalam dua periode terakhir, yaitu:

Gerindra	: 3 kursi
PDI Perjuangan	: 2 kursi
Golongan Karya	: 3 kursi
Nasional Demokrat	: 6 kursi
PKS	: 2 kursi
PPP	: 4 kursi
PAN	: 2 kursi
Hanura	: 0
Demokrat	: 3 kursi
PBB	: 0
PKPI	: 0

4.1.2 Tugas pokok dan fungsi

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris DPRD mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD ;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD ;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD ;
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD ; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Pimpinan DPRD.

Adapun satuan terdiri dari:

1. Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD ;
- b. Mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. Mengelola administrasi keanggotaan DPRD ;

- d. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Sekretariat DPRD ;
- e. Menyediakan fasilitas fraksi DPRD ;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD ;
- g. Menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD ;
- h. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD ;
- i. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD ;
- j. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD ;
- k. Melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota, dan Sekretariat DPRD ;
- l. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD ;
- m. Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD ;
- n. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD ;
- o. Mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD ;
- p. Mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD ;
- q. Menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD.

2. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan kajian perundang-undangan
- b. Memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah ;
- c. Memfasilitasi penyusunan naskah akademik dan draft raperda inisiatif ;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan persidangan ;
- e. Memfasilitasi penyusunan risalah rapat ;
- f. Mengkoordinasikan pembahasan raperda ;
- g. Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi daftar inventaris masalah (DIM) ;
- h. Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat ;
- i. Menyelenggarakan hubungan masyarakat ;
- j. Menyelenggarakan publikasi ;
- k. Menyelenggarakan keprotokolan ; dan
- l. Melaksanakan tugas lain bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

3. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, mempunyai fungsi:

- a. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembahasan KUA PPAS / KUPA PPAS Perubahan ;
- b. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembahasan APBD / APBD Perubahan ;
- c. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
- d. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya ;
- e. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah ;
- f. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- g. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan aspirasi masyarakat ;
- h. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan rumusan rapat dalam rangka pengawasan ;
- i. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kode etik DPRD ;
- j. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran
- k. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan ;
- l. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD ;

- m. Memfasilitasi dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah ; dan
- n. Melaksanakan tugas lain bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

4.2 Hasil penelitian

Kuesioner atau daftar pertanyaan merupakan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dari responden dan sangat menunjang dalam pelaksanaan penelitian. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji validitas untuk mengetahui apakah daftar pertanyaan yang telah disiapkan dapat mengukur variabel yang diukur. Uji validitas dilakukan dengan bantuan program excel dan SPSS versi 20.

4.2.1 Hasil uji validitas

Uji validitas dilakukan dengan cara menghitung korelasi antara masing-masing daftar pertanyaan dengan skor totalnya dengan bantuan program Excel dan SPSS. Hasil pengujian validitas untuk masing-masing variabel penelitian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Uji validitas sikap kerja aparatur (vriabel X)

Variabel penelitian	Nomor pertanyaan	r_{hitung}	$r_{tabel} = 0,413$ ($\alpha = 0,05$; $n = 25$ $Dk = n-2 = 25-2 = 23$)	Keterangan
Sikap kerja aparatur (vriabel X)	1	0.641	0,413	valid
	2	0.686	0,413	valid
	3	0.684	0,413	valid
	4	0.606	0,413	valid
	5	0.723	0,413	valid
	6	0.832	0,413	valid

Sumber: Olahan kuesioner, 2023

Berdasar pada hasil uji validitas sikap kerja aparatur (variabel X) sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.1, dapat diketahui bahwa dari enam pertanyaan dalam kuesioner untuk mengukur sikap kerja aparatur (variabel X), semua pertanyaan memiliki nilai r hitung lebih besar daripada nilai r tabel (r hitung $>$ r tabel). Dengan demikian, menurut ketentuan bahwa jika nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel, maka diputuskan pertanyaan tersebut valid.

Tabel 4.2

Uji validitas terhadap pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y)

Variabel penelitian	Nomor pertanyaan	r hitung	r tabel = 0,413 ($\alpha = 0,05$; $n = 25$ $Dk = n - 2 = 25 - 2$ $= 23$)	Keterangan
Pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y)	1	0.731	0,413	valid
	2	0.670	0,413	valid
	3	0.700	0,413	valid
	4	0.678	0,413	valid
	5	0.639	0,413	valid
	6	0.816	0,413	valid
	7	0.700	0,413	valid
	8	0.790	0,413	valid

Sumber: Olahan kuesioner, 2023

Berdasar pada hasil uji validitas pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y) sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.2, dapat diketahui bahwa dari delapan pertanyaan dalam kuesioner untuk mengukur pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y), semua pertanyaan memiliki nilai r hitung lebih besar daripada nilai r tabel (r hitung $>$ r tabel). Dengan demikian, menurut ketentuan bahwa

jika nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel, maka diputuskan pertanyaan tersebut valid.

4.2.2. Hasil uji reabilitas

Pengujian reliabilitas kuesioner dilakukan untuk mengetahui tingkat kehandalan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas kuesioner dilakukan dengan bantuan program SPSS dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha*. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil uji reabilitas yang dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.3
Hasil uji reliabilitas sikap kerja aparatur (vriabel X)

Cronbach's Alpha	Jumlah pertanyaan
0,882	6

Sumber: Olahan kuesioner, 2023

Pada tabel hasil uji reliabilitas dapat dilihat bahwa untuk mengukur sikap kerja aparatur (vriabel X) terdapat enam pertanyaan dalam kuesioner. Berdasarkan hasil pengujian melalui metode *cronbach's alpha*, didapat nilai sebesar 0,882. Nilai ini lebih besar dari nilai standar yakni 0,60, sehingga dengan demikian *cronbach's alpha* = 0,882 > 0,60). Dengan demikian, sesuai ketentuan pengujian bahwa jika nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari nilai standar yakni 0,60, maka semua pertanyaan untuk mengukur sikap kerja aparatur (vriabel X) disimpulkan reliabel atau terpercaya sebagai pengumpul data.

Tabel 4.4

Hasil uji reliabilitas pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y)

Cronbach's Alpha	Jumlah pertanyaan
0.911	8

Sumber: Olahan kuesioner, 2023

Pada tabel hasil uji reliabilitas dapat dilihat bahwa untuk mengukur pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y) terdapat delapan pertanyaan dalam kuesioner. Berdasarkan hasil pengujian melalui metode *cronbach's alpha*, didapat nilai sebesar 0,911. Nilai ini lebih besar dari nilai standar yakni 0,60, sehingga dengan demikian $\text{cronbach's alpha} = 0,911 > 0,60$). Dengan demikian, sesuai ketentuan pengujian bahwa jika nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari nilai standar yakni 0,60, maka semua pertanyaan untuk mengukur pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y) disimpulkan reliabel atau terpercaya sebagai pengumpul data.

4.3 Deskripsi variabel penelitian

Variabel dalam penelitian ini ialah sikap kerja aparatur (variabel X) dan pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y). Masing-masing indikator dari setiap variabel akan dilakukan pendeskripsian. Adapun deskripsi jawaban responden terhadap masing-masing pertanyaan pada masing-masing indikator pada tiap variabel adalah:

4.3.1 Sikap kerja aparatur (variabel X)

Berdasarkan hasil tabulasi data yang ada pada tabel di bawah, kuesioner yang telah diisi oleh responden sebanyak 25 responden, setelah diolah diperoleh nilai masing-masing indikator dari variabel sikap kerja aparatur (variabel X). Menurut pendapat responden berdasarkan tabel distribusi frekuensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.5

Tanggapan responden tentang aparatur memiliki moral dan semangat kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas

Pertanyaan 1		
Jawaban	Frekuensi (F)	Persent (%)
a. Sangat setuju	4	16.0
b. Setuju	15	60.0
c. Ragu-ragu	5	20.0
d. Kurang setuju	1	4.0
e. Tidak setuju	0	0
Jumlah	25	100%

Sumber : Data olahan 2014

Berdasarkan tanggapan responden tentang aparatur memiliki moral dan semangat kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden, yaitu 15 orang atau 60,0% mengatakan setuju kalau aparatur memiliki moral dan semangat kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aparatur sudah memiliki moral dan semangat kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas.

Tabel 4.6

Tanggapan responden tentang aparatur memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam melaksanakan tugas

Pertanyaan 2		
Jawaban	Frekuensi (F)	Persent (%)
a. Sangat setuju	3	12.0
b. Setuju	11	44.0
c. Ragu-ragu	11	44.0
d. Kurang setuju	0	0
e. Tidak setuju	0	0
Jumlah	25	100%

Sumber : Data olahan 2014

Berdasarkan tanggapan responden tentang aparatur memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam melaksanakan tugas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden, yaitu 11 orang atau 44,0% mengatakan setuju dan ragu-ragu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aparatur sudah memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam melaksanakan tugas..

Tabel 4.7

Tanggapan responden tentang aparatur mengaitkan dirinya dengan pekerjaannya secara aktif untuk berpartisipasi di dalamnya

Pertanyaan 3		
Jawaban	Frekuensi (F)	Persent (%)
a. Sangat setuju	3	12.0
b. Setuju	9	36.0
c. Ragu-ragu	12	48.0
d. Kurang setuju	1	4.0
e. Tidak setuju	0	0
Jumlah	25	100%

Sumber : Data olahan 2014

Berdasarkan tanggapan responden tentang aparatur mengaitkan dirinya dengan pekerjaannya secara aktif untuk berpartisipasi di dalamnya, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden, yaitu 12 orang atau 48,0% mengatakan ragu-ragu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aparatur kurang mengaitkan dirinya dengan pekerjaannya secara aktif untuk berpartisipasi di dalamnya.

Tabel 4.8

Tanggapan responden tentang aparatur memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan tugas

Pertanyaan 4		
Jawaban	Frekuensi (F)	Persent (%)
a. Sangat setuju	3	12.0
b. Setuju	11	44.0
c. Ragu-ragu	10	40.0
d. Kurang setuju	1	4.0
e. Tidak setuju	0	0
Jumlah	25	100%

Sumber : Data olahan 2014

Berdasarkan tanggapan responden tentang aparatur memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan tugas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden, yaitu 11 orang atau 44,0% mengatakan setuju. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aparatur sudah memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan tugas.

Tabel 4.9

Tanggapan responden tentang aparaturnya merasa memiliki organisasi yang bersangkutan dan tidak berkeinginan pindah tugas

Pertanyaan 5		
Jawaban	Frekuensi (F)	Persent (%)
a. Sangat setuju	2	8.0
b. Setuju	10	40.0
c. Ragu-ragu	13	52.0
d. Kurang setuju	0	0
e. Tidak setuju	0	0
Jumlah	25	100%

Sumber : Data olahan 2014

Berdasarkan tanggapan responden tentang aparaturnya merasa memiliki organisasi yang bersangkutan dan tidak berkeinginan pindah tugas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden, yaitu 13 orang atau 52,0% mengatakan ragu-ragu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aparaturnya kurang merasa memiliki organisasi yang bersangkutan dan tidak berkeinginan pindah tugas.

Tabel 4.10

Tanggapan responden tentang aparaturnya bekerja sungguh-sungguh dengan segenap kemampuan kerja yang dimilikinya

Pertanyaan 6		
Jawaban	Frekuensi (F)	Persent (%)
a. Sangat setuju	3	12.0
b. Setuju	11	44.0
c. Ragu-ragu	10	40.0
d. Kurang setuju	1	4.0
e. Tidak setuju	0	0
Jumlah	25	100%

Sumber : Data olahan 2014

Berdasarkan tanggapan responden tentang aparatur bekerja sungguh-sungguh dengan segenap kemampuan kerja yang dimilikinya, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden, yaitu 11 orang atau 44,0% mengatakan setuju. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aparatur kurang bekerja sungguh-sungguh dengan segenap kemampuan kerja yang dimilikinya.

4.3.2 Pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y)

Berdasarkan hasil tabulasi data yang ada pada tabel di bawah, kuesioner yang telah diisi oleh responden sebanyak 25 responden, setelah diolah diperoleh nilai masing-masing indikator dari variabel fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y). Menurut pendapat responden berdasarkan tabel distribusi frekuensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

Tabel 4.11

Tanggapan responden tentang keterlibatan anggota dewan dalam berbagai aktivitas untuk menghasilkan produk legislasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat

Pertanyaan 1		
Jawaban	Frekuensi (F)	Persent (%)
a. Sangat setuju	5	20.0
b. Setuju	11	44.0
c. Ragu-ragu	8	32.0
d. Kurang setuju	1	4.0
e. Tidak setuju	0	0
Jumlah	25	100%

Sumber : Data olahan 2014

Berdasarkan tanggapan responden tentang keterlibatan anggota dewan dalam berbagai aktivitas untuk menghasilkan produk legislasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden, yaitu 11 orang atau 44,0% mengatakan setuju. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggota dewan sudah terlibat dalam berbagai aktivitas untuk menghasilkan produk legislasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Tabel 4.12

Tanggapan responden tentang anggota dewan mengikuti mekanisme penyusunan peraturan daerah (perda)

Pertanyaan 2		
Jawaban	Frekuensi (F)	Persent (%)
a. Sangat setuju	4	16.0
b. Setuju	12	48.0
c. Ragu-ragu	9	36.0
d. Kurang setuju	0	0
e. Tidak setuju	0	0
Jumlah	25	100%

Sumber : Data olahan 2014

Berdasarkan tanggapan responden tentang anggota dewan mengikuti mekanisme penyusunan peraturan daerah (perda), dapat diketahui bahwa sebagian besar responden, yaitu 12 orang atau 48,0% mengatakan setuju. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggota dewan sudah mengikuti mekanisme penyusunan peraturan daerah (perda).

Tabel 4.13

Tanggapan responden tentang anggota dewan memiliki sikap proaktif untuk mengusulkan rancangan peraturan daerah

Pertanyaan 3		
Jawaban	Frekuensi (F)	Persent (%)
a. Sangat setuju	3	36.0
b. Setuju	14	56.0
c. Ragu-ragu	8	32.0
d. Kurang setuju	0	0
e. Tidak setuju	0	0
Jumlah	25	100%

Sumber : Data olahan 2014

Berdasarkan tanggapan responden tentang anggota dewan memiliki sikap proaktif untuk mengusulkan rancangan peraturan daerah, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden, yaitu 14 orang atau 56,0% mengatakan setuju. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggota dewan sudah memiliki sikap proaktif untuk mengusulkan rancangan peraturan daerah.

Tabel 4.14

Tanggapan responden tentang anggota dewan mengakomodir aspirasi yang berkembang dalam masyarakat

Pertanyaan 4		
Jawaban	Frekuensi (F)	Persent (%)
a. Sangat setuju	8	32.0
b. Setuju	10	40.0
c. Ragu-ragu	7	28.0
d. Kurang setuju	0	0
e. Tidak setuju	0	0
Jumlah	25	100%

Sumber : Data olahan 2014

Berdasarkan tanggapan responden tentang anggota dewan mengakomodir aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden, yaitu 10 orang atau 40,0% mengatakan setuju. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggota dewan sudah mengakomodir aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

Tabel 4.15

Tanggapan responden tentang anggota dewan melakukan konsultasi publik sebelum rancangan peraturan daerah (ranperda) menjadi peraturan daerah (perda)

Pertanyaan 5		
Jawaban	Frekuensi (F)	Persent (%)
a. Sangat setuju	9	36.0
b. Setuju	8	32.0
c. Ragu-ragu	7	28.0
d. Kurang setuju	1	4.0
e. Tidak setuju	0	0
Jumlah	25	100%

Sumber : Data olahan 2014

Berdasarkan tanggapan responden tentang anggota dewan melakukan konsultasi publik sebelum rancangan peraturan daerah (ranperda) menjadi peraturan daerah (perda), dapat diketahui bahwa sebagian besar responden, yaitu 9 orang atau 36,0% mengatakan setuju. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggota dewan sudah melakukan konsultasi publik sebelum rancangan peraturan daerah (ranperda) menjadi peraturan daerah (perda).

Tabel 4.16

Tanggapan responden tentang anggota dewan melakukan peninjauan terhadap peraturan daerah (perda) yang telah dijalankan

Pertanyaan 6		
Jawaban	Frekuensi (F)	Persent (%)
a. Sangat setuju	7	28.0
b. Setuju	8	32.0
c. Ragu-ragu	10	40.0
d. Kurang setuju	0	0
e. Tidak setuju	0	0
Jumlah	25	100%

Sumber : Data olahan 2014

Berdasarkan tanggapan responden tentang anggota dewan melakukan peninjauan terhadap peraturan daerah (perda) yang telah dijalankan, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden, yaitu 10 orang atau 40,0% mengatakan ragu-ragu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggota dewan kurang melakukan peninjauan terhadap peraturan daerah (perda) yang telah dijalankan.

Tabel 4.17

Tanggapan responden tentang anggota dewan melakukan pengawalan terhadap peraturan daerah (perda) yang telah dijalankan

Pertanyaan 7		
Jawaban	Frekuensi (F)	Persent (%)
a. Sangat setuju	4	16.0
b. Setuju	12	48.0
c. Ragu-ragu	9	36.0
d. Kurang setuju	0	0
e. Tidak setuju	0	0
Jumlah	25	100%

Sumber : Data olahan 2014

Berdasarkan tanggapan responden tentang anggota dewan melakukan pengawalan terhadap peraturan daerah (perda) yang telah dijalankan, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden, yaitu 12 orang atau 48,0% mengatakan setuju. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggota dewan sudah melakukan pengawalan terhadap peraturan daerah (perda) yang telah dijalankan.

Tabel 4.18

Tanggapan responden tentang anggota dewan melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan perda

Pertanyaan 8		
Jawaban	Frekuensi (F)	Persent (%)
a. Sangat setuju	6	24.0
b. Setuju	12	48.0
c. Ragu-ragu	7	28.0
d. Kurang setuju	0	0
e. Tidak setuju	0	0
Jumlah	25	100%

Sumber : Data olahan 2014

Berdasarkan tanggapan responden tentang anggota dewan melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan perda, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden, yaitu 12 orang atau 48,0% mengatakan setuju. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggota dewan sudah melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan perda.

4.4 Uji statistik

4.4.1 Uji korelasi dan determinasi

Berdasarkan hasil pengujian dan pengolahan data dengan menggunakan metode analisis regresi sederhana, maka dapat diketahui tingkat korelasi dan determinasi antara sikap kerja aparatur (variabel X) terhadap pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y) di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Tabel 4.19

Model summary sikap kerja aparatur (variabel X) terhadap pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
.871 ^a	.758	.748	2.43546	

a. Predictors: (Constant), Sikap kerja aparatur (var. X)

b. Dependent Variable: Pelaksanaan fungsi legislasi (var. Y)

Pada tabel 4.19 dapat dilihat bahwa nilai korelasi disimbolkan dengan R yakni sebesar 0,871 atau 87,1%. Adapun nilai determinasi disimbolkan dengan R Square atau r^2 dapat disebut koefisien determinasi yang dalam hal ini berarti 0,758 (75,8%). Maknanya sumbangan sebesar 0,758 (75,8%) variabel pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y) ini dijelaskan oleh variabel sikap kerja aparatur (variabel X). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sikap kerja aparatur (variabel X) berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y) di

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango sebesar 0,758 atau 75,8%.

4.4.2 Persamaan regresi dan hipotesis

Uji persamaan regresi dan hipotesis menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana untuk variabel sikap kerja aparatur (variabel X) terhadap pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.20

Koefisien sikap kerja aparatur (variabel X) terhadap pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.455	3.174		1.403	
Sikap kerja aparatur (var. X)	1.217	.143	.871	8.489	

a. Dependent Variable: Pelaksanaan fungsi legislasi (var. Y)

Pada tabel 4.20 di atas menggambarkan bahwa persamaan regresi sederhana sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + b \cdot X$$

$$\hat{Y} = 4,455 + 1,217 \cdot X$$

Persamaan struktural ini bermakna bahwa konstanta sebesar 4,455 mengatakan bahwa jika tidak ada kenaikan nilai dari nilai variabel sikap kerja aparatur (variabel

X), maka nilai pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y) adalah 4,455. Koefisien regresi sebesar 1,217 mengatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda +) satu skor atau nilai pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel X) akan memberikan kenaikan skor sebesar 1,217.

Uji t untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (Y) kriteria uji koefisien regresi dari variabel sikap kerja aparatur (variabel X) terhadap pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y) sebagai berikut.

Hipotesis yang diajukan dalam bentuk kalimat.

Ho: Sikap kerja aparatur (variabel X) tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y) di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ha: Sikap kerja aparatur (variabel X) berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y) di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Selanjutnya, untuk mengetahui signifikansi regresi sederhana bandingkan antara nilai probabilitas 0,05 dengan nilai probabilitas *Sig* sebagai berikut.

- Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas *Sig* atau $(0,05 \leq \text{Sig})$, maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak signifikan.
- Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas *Sig* atau $(0,05 \geq \text{Sig})$, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan.

Terlihat bahwa kolom *Sig* (signifikansi) pada tabel 4.20 coefficients variabel YX ternyata nilai probabilitas $Sig = 0,000$ lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai $0,05 > 0,000$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya koefisien regresi adalah signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:

H_a : Sikap kerja aparatur (variabel X) berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y) di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango.

4.5 Pembahasan hasil penelitian

Anggota dewan perwakilan rakyat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sangat sulit untuk menjalankannya secara maksimal seorang diri tanpa dukungan dari orang lain. Untuk itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama fungsi legislasi, anggota dewan dibantu oleh pegawai sekretariat dewan yang merupakan unsur pelaksana teknis pelayanan terhadap dewan perwakilan rakyat daerah. Mereka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, dan yang paling utama mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah, serta menyediakan informasi dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah. Menurut Sriyono (2017:5) tanpa informasi yang memadai dan mudah diperoleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maka akan mengalami kesulitan dalam membahas berbagai masalah dengan mitra kerjanya (pihak pemerintah daerah). Dalam menunjang pelaksanaan fungsi legislasi anggota

dewan, kontribusi yang diberikan oleh pegawai sekretariat dewan sangat besar manfaatnya karena fungsi anggota dewan tidak akan berjalan dengan baik, kalau tidak dibantu oleh pegawai sekretariat dewan, seperti memfasilitasi rapat-rapat yang dilaksanakan oleh anggota dewan dan mendokumentasikan produk hukum daerah yang telah disahkan bahkan ikut dalam mensosialisasikannya kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango mempunyai kesempatan yang sangat luas untuk melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan atas jalannya roda pemerintahan daerah. Usaha pembenahan dalam organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan guna merespon setiap tuntutan yang datang dari masyarakat sebagai suatu jawaban atas berbagai masalah yang selama ini dihadapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Olehnya itu, keberadaan sekretariat dewan haruslah benar-benar dapat menunjang pelaksanaan tugas anggota dewan.

Untuk mewujudkan sosok pegawai sekretariat dewan yang handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas, maka tentunya harus didukung oleh dorongan yang berupa sikap kerja yang ada pada diri setiap pegawai di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango. Kelancaran kerja dari setiap unit instansi dalam melaksanakan aktivitasnya tergantung pada sikap dari pegawai yang ada di dalamnya, karena sikap kerja yang positif dari pegawai mencerminkan rasa senang

mereka terhadap pekerjaan yang dilakukannya, sebagaimana dikatakan oleh Sarwono, 2009:201) bahwa sikap (attitude) adalah istilah yang mencerminkan rasa senang, tidak senang, atau perasaan biasa-biasa saja (netral) dari seseorang terhadap sesuatu. Sesuatu itu bisa benda, kejadian, situasi, orang-orang atau kelompok, kalau yang timbul terhadap sesuatu itu adalah perasaan senang, maka disebut sikap positif. Sedangkan perasaan tidak senang disebut sikap negatif. Kalau tidak timbul perasaan apa-apa berarti sikapnya netral.

Hasil penelitian di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango menunjukkan bahwa sikap kerja aparatur (variabel X) berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y) di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango sebesar 0,758 (75,8%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sikap kerja aparatur sudah membantu anggota dewan Bone Bolango dalam melaksanakan fungsi legislasinya. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian Mawarni (2018) yang menyimpulkan bahwa sikap kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel Medan. Hal ini berarti bahwa jika sikap kerja tinggi, maka kinerja karyawan juga akan meningkat.

Oleh karena itu, masalah sikap kerja aparatur sekretariat dewan perlu diberikan perhatian yang lebih. Perhatian yang demikian besar itu, tidak lain tujuannya adalah meningkatkan prestasi kerja yang pada gilirannya akan eksistensi dari pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan. Selain itu, perhatian yang serius terhadap aparatur

untuk peningkatan prestasi kerja mereka tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya sikap kerja mereka terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasar pada hasil penelitian juga diketahui bahwa walaupun sikap kerja aparatur dapat memberikan kontribusi positif pada pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y) di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango, namun ada beberapa indikator yang mendapat tanggapan negatif responden diantaranya aparatur kurang memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Sikap kerja yang kurang pada pekerjaan dapat mengakibatkan aparatur menjadi malas dan kurang memiliki kepada pekerjaannya. Disiplin merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka menciptakan pegawai negeri sipil yang bermutu untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya demi pencapaian tujuan organisasi. Dan dengan disiplin, maka akan terwujud suatu sikap yang mencerminkan ketaatan kepada suatu peraturan. Sikap kerja dan disiplin aparatur memiliki keterkaitan erat karena keduanya berkaitan dengan sikap mental aparatur, seperti yang dikatakan oleh Sinungan (2018:145) bahwa disiplin ialah sebagai sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa ketaatan (*obedience*) terhadap peraturan-peraturan atau ketentuan yang ditetapkan pemerintah atau etik, norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat untuk tujuan tertentu. Kedisiplinan

merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan sekretariat dewan dan norma-norma sosial yang berlaku.

Hasil temuan lainnya yakni indikator yang mendapat tanggapan negatif ialah aparatur sekretariat dewan masih kurang mengaitkan dirinya dengan pekerjaannya secara aktif untuk berpartisipasi di dalamnya. Hal ini mengindikasikan masih kurangnya tingkat kesadaran aparatur terhadap tugasnya. Kesadaran juga berkaitan sikap seseorang yang secara sukarela mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Kondisi ini juga sesuai dengan indikator lain yang mendapat tanggapan negatif yakni aparatur kurang merasa memiliki organisasi yang bersangkutan, sehingga kurang berminat meningkatkan kualitas kerjanya. Menurut Kristiadi (2014:98) aparat birokrasi dalam peranannya menghadapi tugas ganda, yakni disatu pihak aparat birokrasi harus mampu melakukan kiat-kiat strategis dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pihak yang membutuhkan pelayanan mereka, dilain pihak aparat birokrasi juga harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam lingkungannya.

Sikap kerja merupakan akibat dari interaksi aparatur dengan situasi tertentu yang dihadapinya. Sikap kerja yang positif merupakan daya pendorong yang mengakibatkan aparatur mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau ketrampilan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Sikap kerja aparatur (variabel X) berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y) di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango sebesar 0,758 atau sebesar 75,8%. Hal ini berarti bahwa sikap kerja aparatur sudah dapat mendukung pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan. Namun demikian, ada beberapa indikator yang harus mendapat penekanan untuk ditingkatkan lagi masih mendapat penilaian negatif dari responden, yakni aparatur kurang memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam melaksanakan tugas, aparatur sekretariat dewan masih kurang mengaitkan dirinya dengan pekerjaannya secara aktif untuk berpartisipasi di dalamnya, serta anggota dewan masih kurang melakukan peninjauan terhadap peraturan daerah (perda) yang telah dijalankan. Indikator yang masih mendapat tanggapan negatif dari responden tersebut merupakan salah satu penyebab sikap kerja aparatur yang kurang maksimal dalam memberikan dukungan pada pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan Kabupaten Bone Bolango.

5.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan hasil penelitian, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Kepala sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango sebaiknya lebih mengoptimalkan kepala-kepala bagian untuk lebih aktif lagi memberikan dorongan berupa dialog dengan bawahan mereka untuk meningkatkan sikap mereka pada tugas pokok dan fungsinya.
2. Kepala sekretariat sebaiknya lebih meningkatkan lagi koordinasi antara aparatur sekretariat dengan anggota dewan dalam pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga aparatur sekretariat dapat memaksimalkan fungsi dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan. Di samping itu, kepala sekretariat hendaknya lebih aktif mendisiplinkan aparaturnya dengan memberikan sanksi kepada aparatur yang kurang disiplin dalam pelaksanaan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Asmawi. 2014. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Lembaga Legislatif Daerah. *Jurnal Cita*, I, Juni 2014, hlm, 9-10.
- Bangun, Wilson. 2018. *Intisari Manajemen*. Refika Aditama. Bandung.
- Davis, K., dan Newstrom, J. W. 2000. *Perilaku Dalam Organisasi*. Edisi Ketujuh. Erlangga. Jakarta.
- Dewi, R. 2008. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kepuasan Kerja Akuntan Publik.
- Fahmi, Irham. 2012. *Manajemen, Teori, Kasus, dan Solusi*. Alfabeta, Bandung.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2008. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Kaswan. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Keunggulan Bersaing Organisasi*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Kristiadi, JB. 2014. *Administrasi/Manajemen Pembangunan*. Sub Bagian Tata Usaha LAN. Jakarta.
- Lili Romli dan Suryarama. 2017. *Legislasi Indonesia*. Universitas Terbuka. Banten.
- Mawarni, Ana. 2018. Pengaruh Sikap Kerja dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel Medan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2007. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Republik Indonesia. Kementerian Sekretariat Negara. Jakarta.
- Rahayuningsih, SU. 2016. *Sikap (Attitude)*. Gunadarma. Jakarta.

- Riduwan, 2017. Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Alfabeta. Bandung
- Ridwan. 2019. Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Alfabeta. Bandung.
- Robbins, Stephen P, dan Judge, Timothy A. 2008. Perilaku Organisasi: Organizational Behavior. Buku 1, Edisi 12. Salemba Empat. Jakarta.
- Sarwono, S.W. 2009. Teori-teori Psikologi Sosial. Rajagrafindo Persada. Jakarta..
- Sinungan, Muchdarsyah. 2018. Produktivitas, Apa dan Bagaimana. Bumi Aksara. Yogyakarta.
- Sriyono. 2017. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Bekasi, Jawa Barat. Gunung Agung. Jakarta.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Alfabeta. Bandung.
- Sutrisno, Edy. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Suwanda, Dadang. 2016. Peningkatan Fungsi DPRD dalam Penyusunan Perda yang Responsive. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Umam, Khaerul. 2010. Perilaku Organisasi. Pustaka Setia. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kementerian Sekretariat Negara. Jakarta

SIKAP KERJA APARATUR (VARIABLE X)

No. Resp.	1	2	3	4	5	6	JUMLAH
1	4	3	3	3	3	3	19
2	4	3	3	3	4	4	21
3	3	3	4	4	3	3	20
4	4	4	4	3	4	3	22
5	4	4	3	4	4	4	23
6	4	3	4	3	3	3	20
7	3	3	3	3	3	2	17
8	4	3	3	4	4	4	22
9	4	4	3	3	3	3	20
10	4	4	5	5	5	5	28
11	4	4	3	3	3	3	20
12	3	3	3	4	3	3	19
13	4	4	4	3	4	4	23
14	4	3	4	4	3	3	21
15	5	4	3	3	4	4	23
16	2	3	3	3	3	3	17
17	4	4	4	4	4	4	24
18	5	5	5	5	5	5	30
19	3	3	3	4	3	3	19
20	3	3	2	2	3	3	16
21	4	4	4	3	4	4	23
22	4	5	5	4	4	4	26
23	5	4	4	5	4	5	27
24	5	5	4	4	3	4	25
25	4	4	3	4	3	4	22

Uji validitas dan reliabilitas

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	25	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	25	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.882	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	18.0000	8.750	.641	.558	.870
VAR00002	18.2000	8.750	.686	.591	.863
VAR00003	18.3200	8.393	.684	.614	.864
VAR00004	18.2800	8.710	.606	.586	.877
VAR00005	18.3200	8.810	.723	.722	.858
VAR00006	18.2800	7.877	.832	.825	.837

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI (VARIABEL Y)

No. Resp.	1	2	3	4	5	6	7	8	JUMLAH
1	3	3	3	5	3	3	3	4	27
2	3	3	4	4	5	3	4	3	29
3	4	4	4	3	3	4	4	4	30
4	4	4	4	4	4	3	3	4	30
5	4	3	4	4	4	4	4	4	31
6	3	4	3	3	4	4	4	4	29
7	3	3	4	3	3	3	3	3	25
8	4	4	4	4	5	5	3	4	33
9	3	3	3	4	4	3	4	3	27
10	5	5	5	5	4	5	5	5	39
11	4	4	3	3	3	3	3	4	27
12	3	3	4	4	3	3	3	3	26
13	5	4	4	5	4	4	4	4	34
14	2	3	3	3	2	3	3	3	22
15	4	4	4	4	5	5	4	5	35
16	4	3	3	3	3	3	3	3	25
17	4	5	4	5	5	4	5	5	37
18	5	5	5	5	5	5	5	5	40
19	4	4	3	4	4	3	3	4	29
20	3	4	3	3	5	4	4	3	29
21	3	4	4	4	4	4	4	4	31
22	5	4	4	5	5	5	4	5	37
23	5	5	5	5	5	5	4	4	38
24	4	3	4	5	5	5	5	5	36
25	4	4	4	4	3	4	4	4	31

Uji validitas dan reliabilitas

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	25	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	25	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.911	8

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	27.2800	17.793	.731	.647	.897
VAR00002	27.2800	18.877	.670	.556	.903
VAR00003	27.2800	19.127	.700	.620	.901
VAR00004	27.0400	18.290	.678	.621	.902
VAR00005	27.0800	17.743	.639	.540	.908
VAR00006	27.2000	17.167	.816	.755	.889
VAR00007	27.2800	18.710	.700	.568	.900
VAR00008	27.1200	18.027	.790	.741	.893

HASIL REKAPITULASI

Nomor Responden	SIKAP KERJA APARATUR (VARIABLE X)	PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI (VARIABEL Y)
1	19	27
2	21	29
3	20	30
4	22	30
5	23	31
6	20	29
7	17	25
8	22	33
9	20	27
10	28	39
11	20	27
12	19	26
13	23	34
14	21	22
15	23	35
16	17	25
17	24	37
18	30	40
19	19	29
20	16	29
21	23	31
22	26	37
23	27	38
24	25	36
25	22	31

DISTRIBUSI TANGGAPAN RESPONDEN

SIKAP KERJA APARATUR (VARIABLE X)

Frequency Table

pertanyaan 1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	1	4.0	4.0	4.0
3.00	5	20.0	20.0	24.0
4.00	15	60.0	60.0	84.0
5.00	4	16.0	16.0	100.0
Total	25	100.0	100.0	

pertanyaan 2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	11	44.0	44.0	44.0
4.00	11	44.0	44.0	88.0
5.00	3	12.0	12.0	100.0
Total	25	100.0	100.0	

pertanyaan 3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	1	4.0	4.0	4.0
3.00	12	48.0	48.0	52.0
4.00	9	36.0	36.0	88.0
5.00	3	12.0	12.0	100.0
Total	25	100.0	100.0	

pertanyaan 4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	4.0	4.0	4.0
	3.00	10	40.0	44.0	48.0
	4.00	11	44.0	40.0	88.0
	5.00	3	12.0	12.0	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

pertanyaan 5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	13	52.0	52.0	52.0
	4.00	10	40.0	40.0	92.0
	5.00	2	8.0	8.0	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

pertanyaan 6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	4.0	4.0	4.0
	3.00	10	40.0	44.0	48.0
	4.00	11	44.0	40.0	88.0
	5.00	3	12.0	12.0	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI (VARIABEL Y) **Frequency Table**

pertanyaan 1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	4.0	4.0	4.0
	3.00	8	32.0	32.0	36.0
	4.00	11	44.0	44.0	80.0
	5.00	5	20.0	20.0	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

pertanyaan 2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	9	36.0	36.0	36.0
	4.00	12	48.0	48.0	84.0
	5.00	4	16.0	16.0	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

pertanyaan 3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	8	32.0	32.0	32.0
	4.00	14	56.0	56.0	88.0
	5.00	3	12.0	12.0	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

pertanyaan 4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	7	28.0	28.0	28.0
	4.00	10	40.0	40.0	68.0
	5.00	8	32.0	32.0	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

pertanyaan 5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	4.0	4.0	4.0
	3.00	7	28.0	28.0	32.0
	4.00	8	32.0	32.0	64.0
	5.00	9	36.0	36.0	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

pertanyaan 6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	10	40.0	40.0	40.0
	4.00	8	32.0	32.0	72.0
	5.00	7	28.0	28.0	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

pertanyaan 7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
--	--	-----------	---------	---------------	-----------------------

Valid	3.00	9	36.0	36.0	36.0
	4.00	12	48.0	48.0	84.0
	5.00	4	16.0	16.0	100.0
Total		25	100.0	100.0	

pertanyaan 8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	7	28.0	28.0
	4.00	12	48.0	76.0
	5.00	6	24.0	100.0
Total		25	100.0	

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Pelaksanaan fungsi legislasi (var. Y)	31.0800	4.84699	25
Sikap kerja aparatur (var. X)	21.8800	3.46795	25

Correlations

		Pelaksanaan fungsi legislasi (var. Y)	Sikap kerja aparatur (var. X)
Pearson Correlation	Pelaksanaan fungsi legislasi (var. Y)	1.000	.871
	Sikap kerja aparatur (var. X)	.871	1.000
Sig. (1-tailed)	Pelaksanaan fungsi legislasi (var. Y)	.	.000
	Sikap kerja aparatur (var. X)	.000	.
N	Pelaksanaan fungsi legislasi (var. Y)	25	25
	Sikap kerja aparatur (var. X)	25	25

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.871 ^a	.758	.748	2.43546	

a. Predictors: (Constant), Sikap kerja aparatur (var. X)

b. Dependent Variable: Pelaksanaan fungsi legislasi (var. Y)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	427.417	1	427.417	72.059	.000 ^a
	Residual	136.423	23	5.931		

Total	563.840	24			
-------	---------	----	--	--	--

a. Predictors: (Constant), Sikap kerja aparatur (var. X)

b. Dependent Variable: Pelaksanaan fungsi legislasi (var. Y)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.455	3.174		1.403	
Sikap kerja aparatur (var. X)	1.217	.143	.871	8.489	

a. Dependent Variable: Pelaksanaan fungsi legislasi (var. Y)

KUESIONER PENELITIAN

**Pengaruh Sikap Kerja Aparatur Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi
Anggota Dewan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bone Bolango**

Petunjuk:

Mohon dijawab dengan memberikan tanda silang (X) atau (√) pada kolom jawaban.

Pertanyaan:**Sikap Kerja Aparatur (variable X)**

		SS	S	R	KS	TS
1	Aparatur memiliki moral dan semangat kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas					
2	Aparatur memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam melaksanakan tugas					
3	Aparatur mengaitkan dirinya dengan pekerjaannya secara aktif untuk berpartisipasi di dalamnya					
4	Aparatur memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan tugas					
5	Aparatur merasa memiliki organisasi yang bersangkutan dan tidak berkeinginan pindah tugas					
6	Aparatur bekerja sungguh-sungguh dengan segenap kemampuan kerja yang dimilikinya					

Pelaksanaan Fungsi Legislasi (variabel Y)

		SS	S	R	KS	TS
1	Keterlibatan anggota dewan dalam berbagai aktivitas untuk menghasilkan produk legislasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat					
2	Anggota dewan mengikuti mekanisme penyusunan peraturan daerah (perda)					
3	Anggota dewan memiliki sikap proaktif untuk mengusulkan rancangan peraturan daerah					
4	Anggota dewan mengakomodir aspirasi yang berkembang dalam masyarakat					
5	Anggota dewan melakukan konsultasi publik sebelum rancangan peraturan daerah (Ranperda) menjadi peraturan daerah (Perda)					
6	Anggota dewan melakukan peninjauan terhadap peraturan daerah (Perda) yang telah dijalankan					
7	Anggota dewan melakukan pengawalan terhadap peraturan daerah (Perda) yang telah dijalankan					
8	Anggota dewan melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan perda					

KUESIONER PENELITIAN

Pengaruh Sikap Kerja Aparatur Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi Anggota Dewan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango

Petunjuk:

Mohon dijawab dengan memberikan tanda silang (X) atau (√) pada kolom jawaban.

Pertanyaan:

Sikap Kerja Aparatur (variable X)

		SS	S	R	KS	TS
1	Aparatur memiliki moral dan semangat kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas					
2	Aparatur memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam melaksanakan tugas					
3	Aparatur mengaitkan dirinya dengan pekerjaannya secara aktif untuk berpartisipasi di dalamnya					
4	Aparatur memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan tugas					
5	Aparatur merasa memiliki organisasi yang bersangkutan dan tidak berkeinginan pindah tugas					
6	Aparatur bekerja sungguh-sungguh dengan segenap kemampuan kerja yang dimilikinya					

Pelaksanaan Fungsi Legislasi (variabel Y)

		SS	S	R	KS	TS
1	Keterlibatan anggota dewan dalam berbagai aktivitas untuk menghasilkan produk legislasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat					
2	Anggota dewan mengikuti mekanisme penyusunan peraturan daerah (perda)					
3	Anggota dewan memiliki sikap proaktif untuk mengusulkan rancangan peraturan daerah					
4	Anggota dewan mengakomodir aspirasi yang berkembang dalam masyarakat					
5	Anggota dewan melakukan konsultasi publik sebelum rancangan peraturan daerah (Ranperda) menjadi peraturan daerah (Perda)					
6	Anggota dewan melakukan peninjauan terhadap peraturan daerah (Perda) yang telah dijalankan					
7	Anggota dewan melakukan pengawalan terhadap peraturan daerah (Perda) yang telah dijalankan					
8	Anggota dewan melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan perda					



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/0/2001
Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435)829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
Nomor : 021/FISIP-UNISAN/S-BP/III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Purwanto, S.IP.,M.Si
NIDN : 0926096601
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : MOHAMAD RIVAL KIDAMU
NIM : S2120066
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Judul Skripsi : Pengaruh Sikap Kerja Aparatur Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi Anggota Dewan Di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **9%** berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,


Dr. Mochammad Sakir, S.Sos.,S.I.Pem.,M.Si
NIDN. 0913027101

Gorontalo, 16 Maret 2024
Tim Verifikasi,


Purwanto, S.IP.,M.Si
NIDN. 0926096601

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin
DF

PAPER NAME

SKRIPSI RIVAL KIDAMU.doc

AUTHOR

Muhammad Rival Kidamu

WORD COUNT

9546 Words

CHARACTER COUNT

63052 Characters

PAGE COUNT

61 Pages

FILE SIZE

280.5KB

SUBMISSION DATE

Oct 18, 2023 5:19 PM GMT+7

REPORT DATE

Oct 18, 2023 5:22 PM GMT+7**● 9% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 9% Internet database
- 2% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 30 words)

ABSTRACT

MOHAMAD RIVAL KIDAMU. S2120066. THE EFFECT OF APPARATUS' WORK ATTITUDES ON THE LEGISLATIVE FUNCTION IMPLEMENTATION OF BOARD MEMBERS AT THE SECRETARIAT OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF BONE BOLANGO REGENCY

This study aims to find the effect of the apparatus' work attitude on the legislative function implementation of board members at the Secretariat of the Regional House of Representatives of Bone Bolango Regency. It employs a quantitative approach with a survey method. The survey research explains the causal relationship and hypothesis testing. The number of samples in this study covers 25 people. The data analysis method uses simple regression analysis. The results of this study show that the apparatus' work attitude (variable X) affects the legislative function implementation of board members (variable Y) at the Secretariat of the Regional House of Representatives of Bone Bolango Regency by 0.758 or 75.8%. It means that the apparatus' work attitude can support the legislative function implementation of the board members.

Keywords: work attitude, legislative function, Secretariat of Regional House of Representatives

ABSTRAK

MOHAMAD RIVAL KIDAMU. S2120066. PENGARUH SIKAP KERJA APARATUR TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI ANGGOTA DEWAN DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh sikap kerja aparatur terhadap pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey. Penelitian survei yang dimaksud adalah bersifat menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesis. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 25 orang. Adapun metode analisis data menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap kerja aparatur (variabel X) berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan (variabel Y) di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango sebesar 0,758 atau sebesar 75,8%. Hal ini berarti bahwa sikap kerja aparatur sudah dapat mendukung pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan.

Kata kunci: sikap kerja, fungsi legislasi, Sekretariat DPRD





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4699/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IX/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Moh. Rival Kidamu

NIM : S2120066

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian : KANTOR SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH (DPRD) KABUPATEN BONE BOLANGO

Judul Penelitian : PENGARUH SIKAP KERJA APARATUR TERHADAP
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI ANGGOTA DEWAN
DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 11 September 2023

Ketua,

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN 0929117202

+



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONEBOLANGO
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Dr. Zainal Umar Sidiki No. 1 Desa Moutong Kec. Tilongkabila

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKSANKAN PENELITIAN

No. 800/SET.DPRD/BB/132/X/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Rahman Bau, MM

Nip : 19681013 200501 1 010

Pangkat/Gol : Pembina Tk I / IV b

Jabatan : Kepala Bagian Persidangan

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Mohamad Rival Kidamu


NIM : S 212 0066

Telah selesai melaksanakan kegiatan Penelitian di DPRD Kab. Bone Bolango dengan Judul
***“Penelitian Pengaruh Sikap Kerja Aparatur Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi Anggota
Dewan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango”***

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tilongkabila, 10 Oktober 2023

Kepala Bagian Persidangan


Drs. Rahman Bau, MM
Nip. 19681013 200501 1 010

RIWAYAT HIDUP

Nama : Rival Kidamu
NIM : S2120006
Tempat /Tgl Lahir : Tapa,04 Januari 2001
Nama Ayah : Arpan Kidamu
Nama Ibu : Novita Kasim
Alamat : Jln Tapa Kabila Desa Talumopatu Kecamatan Tapa
Fakultas/ Prodi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S1
Judul Skripsi : Pengaruh Sikap Kerja Aparatur Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi Anggota Dewan di Sekretariat dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango



SEKOLAH	MASUK/LULUS
SD NEGERI I TAPA	2008-2014
SMP NEGERI 1 TAPA	2014-2017
SMA NEGERI I TAPA	2017-2020
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	2020-2024